



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AZIZAH, perempuan, tempat lahir Ms Tambo, tanggal lahir 31 Desember 1970, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Blang Pulo, Desa Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 26 November 2024 dibawah register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Sa'ad dan Ibu pemohon bernama Tihawa;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama AZIZAH, NIK 1111037112700014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama AZIZAH, NIK 1111037112700014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 111 I-LT-22112016-0099 tertulis nama AZIZAH tempat tanggal lahir di Ms Tambo pada tanggal 31 Desember 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 26 November 2024;
- Bahwa pada pasport Pemohon dengan Nomor T 262003 tertulis nama AZIZAH Binti Sa'ad tempat tanggal lahir di Ms Tambo pada tanggal 24 April 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada tanggal 11 Juni 2009;
- Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah Nama AZIZAH Binti Sa'ad tanggal lahir 24 April 1970;
- Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama AZIZAH tanggal lahir 31 Desember 1970;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang Sebenarnya Pada Akte Kelahiran dan Identitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat- surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain:
 - Fotocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy KK Pemohon
 - Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
 - Fotocopy Pasport Pemohon

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pergantian Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama AZIZ AH tanggal lahir 31 Desember 1970 Pada Pasport;
3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Indentitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Azizah;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Azizah;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Paspor Nomor T 262003 atas nama Azizah Binti Sa'ad;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Azizah;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nuraini dan Aisyah, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nuraini:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor adalah nama yang semula Azizah Binti Sa'ad menjadi Azizah dan tanggal lahir yang semula 24 April 1970 menjadi 31 Desember 1970;
- Bahwa Sa'ad adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus Paspor;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan pergi ke luar negeri yaitu melaksanakan ibadah haji;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aisyah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah identitas Pemohon yang ada di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang hendak dirubah di dalam paspor adalah nama yang semula Azizah Binti Sa'ad menjadi Azizah dan tanggal lahir yang semula 24 April 1970 menjadi 31 Desember 1970;
- Bahwa Sa'ad adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa kekeliruan identitas itu terjadi saat Pemohon mengurus Paspor;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas itu untuk keperluan pergi ke luar negeri yaitu melaksanakan ibadah haji;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula Azizah Binti Sa'ad lahir tanggal 24 April 1970 menjadi Azizah lahir tanggal 31 Desember 1970;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Nuraini dan Aisyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya memohon supaya Pengadilan menyatakan sah pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Mns. Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai "UU Adminduk"), bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 32 UU Adminduk, diatur sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

Pasal 32

- (1) *Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.*
- (2) *Dihapus.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan apabila pelaporan tersebut melampaui batas waktu, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kelahiran seseorang, maka perlu melihat Dokumen Kependudukan berupa Akta Pencatatan Sipil terkait yang memuat tentang peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) UU Adminduk, salah satu Dokumen Kependudukan adalah Akta Pencatatan Sipil, yang berdasarkan Pasal 66 UU Adminduk, Akta Pencatatan Sipil terdiri dari Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Pencatatan Sipil, yang menjadi dokumen sah dan resmi terkait dengan pernyataan dan keterangan tentang lahirnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan menemukan Bukti P-4 berupa fotokopi Paspur atas nama Azizah Binti Sa'ad lahir tanggal 24 Apr 1970 nomor T 262003 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2014 oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Kemudian Pengadilan menemukan pula Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azizah, lahir di Ms Tambo pada tanggal 31 Desember 1970 sehingga Pengadilan menemukan bukti pembanding yang menerangkan dan menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, yaitu Azizah, lahir pada tanggal 31 Desember 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-3 tersebut, terdapat ketidaksesuaian identitas Pemohon ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi, dimana Pemohon bernama Azizah dan lahir pada tanggal 31 Desember 1970, sehingga dapat menguatkan dalil Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dapat dibuktikan bahwa benar Pemohon atas nama Azizah, lahir pada tanggal 31 Desember 1970, sedangkan dalam Paspur Nomor T 262003 tertera atas nama Azizah Binti Sa'ad lahir pada tanggal 24 April 1970 maka perlu dilakukan penyesuaian identitas dalam hal ini nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan Akta Kependudukan yang memuat peristiwa penting yaitu kelahiran dari Pemohon, untuk tercapainya tertib administrasi bagi penduduk sebagaimana diamanatkan dalam UU Adminduk;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P-5 berupa fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Rukiah, yang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti yang tidak memiliki relevansi dalam menunjukkan keabsahan tentang pernyataan dan keterangan lahirnya seseorang dalam hal ini Pemohon yang bernama Azizah, oleh karena itu bukti tersebut di atas haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, diatur sebagai berikut:

Pasal 24

(1) *Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.*

(2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:*

- a. *pengajuan permohonan penggantian paspor;*
- b. *penelaahan pejabat imigrasi;*
- c. *persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;*
- d. *persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan*
- e. *penerbitan paspor.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan data paspor biasa menyangkut tentang prosedur perubahan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tempat tanggal lahir pada dasarnya Pengadilan tidak berwenang untuk mengesahkan pergantian nama dan tanggal lahir seseorang yang tercantum dalam Paspor, karena tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan manapun. Namun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diamanatkan bahwa seorang Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim perlu menggali lebih dalam lagi mengenai sesuatu hal atau peristiwa hukum yang belum ada pengaturannya di dalam perundang-undangan. Jika dilihat kembali, berdasarkan Penjelasan UU Adminduk hakikat dari pengaturan administrasi kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, serta melihat urgensi dari permohonan ini yaitu pengurusan administrasi Pemohon yang hendak memperpanjang paspor guna melakukan perjalanan ke luar negeri dan melaksanakan ibadah haji, Pengadilan berpendapat Negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan atas status hukum Pemohon terutama ketika berada di luar wilayah Republik Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang sangat berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka Pengadilan dapat mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dengan perubahan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 juncto

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah identitas Pemohon yaitu nama Azizah lahir pada tanggal 31 Desember 1970;
3. Memberikan izin kepada Kepala atau Pejabat Kantor Imigrasi Republik Indonesia Kelas I Lhokseumawe untuk melakukan pembetulan identitas Pemohon, pada Paspor Nomor T 262003 dari semula tertulis Azizah Binti Sa'ad lahir tanggal 24 April 1970 menjadi Azizah lahir tanggal 31 Desember 1970, baik untuk saat ini maupun untuk proses perpanjangan paspor yang bersangkutan di kemudian hari;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir, tanggal 26 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harperiyani Effendi, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)